

Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pemilihan Umum: Peran Muhammadiyah pada Pemilihan Presiden 2019

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2021, Vol. 11, No. 2: 241-262
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
© The Author(s) 2021

Bhakti Gusti Walinegoro*

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Bambang Eka Cahya Widodo

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Artikel ini membahas tentang peran Muhammadiyah sebagai masyarakat sipil (*civil society*) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Perhelatan Pilpres 2019 menjadi tantangan tersendiri bagi Muhammadiyah. Selain harus memainkan perannya sebagai masyarakat sipil, Muhammadiyah juga memiliki tantangan besar dalam mengelola fragmentasi elit yang terjadi di dalam internal Muhammadiyah maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat Pilpres 2019. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis peran yang dilakukan, fragmentasi elit yang terjadi dan resolusi konflik yang diupayakan oleh Muhammadiyah dalam perhelatan Pilpres 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data bersumber dari buku, jurnal, regulasi, majalah, berita dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Pilpres 2019, Muhammadiyah telah melaksanakan perannya sebagai kekuatan masyarakat sipil meliputi peran pelayanan publik, peran substitusi dan peran penyeimbang. Kemudian, fragmentasi elit yang terjadi di Muhammadiyah ditunjukkan dari adanya tiga kelompok, yaitu pendukung Jokowi-Ma'ruf, pendukung Prabowo-Sandi dan kelompok yang diam dengan pilihannya. Adapun resolusi konflik yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam mengelola konflik internal maupun eksternal telah diupayakan hingga pada tahap rekonstruksi. Artikel ini menyimpulkan bahwa pada Pilpres 2019, Muhammadiyah mempertegas posisinya sebagai kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan memperkuat komitmennya untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

* Penulis untuk korespondensi:

Bhakti Gusti Walinegoro

Perumahan Taman Hijau No.3, Brajan Rt 04, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Email: bhaktigusti5@gmail.com

Kata-kata Kunci

Masyarakat sipil, Muhammadiyah, fragmentasi elit, resolusi konflik, Pilpres

Abstract

The 2019 Presidential Election was a big challenge for Muhammadiyah. Apart from having to play its role as a civil society, Muhammadiyah faced an internal elite fragmentation and social conflicts that resulted from the 2019 Presidential Election. The purpose of this article is to analyze the roles played, elite fragmentation, and conflict resolution pursued by Muhammadiyah in the 2019 Presidential Election. The method used in this research was a qualitative case study. The results of this study indicate that in the 2019 Presidential Election, Muhammadiyah played its roles as a civil society including providing public services, being substitute for the government and keeping social-political balance. Moreover, Muhammadiyah attempted to manage the elite fragmentation within Muhammadiyah during the 2019 Presidential Election by separating its members' personal political choices from its formal organisational political stance of neutrality. This article concludes that in the 2019 Presidential Election, Muhammadiyah emphasized its position as a power of civil society in Indonesia and strengthened its commitment not to engage in practical politics.

Key Words

Civil society, Muhammadiyah, elite fragmentation, conflict resolution, presidential election

Pendahuluan

Sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi, Indonesia pada tahun 2019 berhasil menggelar pemilihan presiden (Pilpres), pesta demokrasi yang dikatakan menjadi pemilu terumit yang pernah diselenggarakan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdampak pada Pilpres dilaksanakan serentak dengan pemilihan legislatif (Pileg) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Meskipun dilaksanakan secara serentak dengan Pileg, yang paling disorot adalah persaingan antara kedua pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden, yaitu Jokowi-Ma'arif Amin dan Prabowo-Sandi.

Kontestasi antara Jokowi dan Prabowo berlanjut pada Pilpres 2019 setelah sebelumnya kedua tokoh tersebut bersaing pada Pilpres 2014, di mana Jokowi memenangkan kontestasi tersebut. Beragam kejadian yang memicu konflik terjadi baik sebelum maupun setelah penyelenggaraan Pilpres 2019. Suhu politik yang memanas dan gejolak politik yang meningkat menyebabkan munculnya konflik di berbagai lapisan masyarakat.

Keadaan yang terjadi pada Pilpres 2019 ini mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak karena potensi konfliknya yang sangat tinggi dan berkepanjangan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah sebagai salah satu ormas yang selalu berkontribusi menjaga pilar demokrasi dan kedamaian bangsa dinilai dapat memainkan perannya dalam kasus ini. Dilihat dari perjalanannya, Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) dianggap memiliki multi-wajah. Aktivitasnya dalam berbagai bidang seperti keagamaan, sosial, kesehatan dan pendidikan telah menempatkan Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan besar masyarakat sipil di Indonesia. Selain itu, menurut Nashir (2011:53-54), Muhammadiyah dengan fungsi politiknya juga banyak berperan dalam pergerakan kebangkitan kebangsaan, mengokohkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan fondasi bangsa dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap berada dalam konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Namun, pada kasus Pilpres 2019, realita yang terjadi tidak semudah yang diharapkan. Kader Muhammadiyah menyebar ke dalam dua kubu berbeda sehingga menyebabkan adanya perbedaan pandangan dan pendapat yang memicu terjadinya fragmentasi elit di dalam tubuh Muhammadiyah.

Perhelatan Pilpres 2019 menjadi tantangan tersendiri bagi Muhammadiyah. Selain harus memainkan perannya sebagai masyarakat sipil, Muhammadiyah juga memiliki tantangan besar dalam mengelola konflik, baik berupa fragmentasi elit di internal Muhammadiyah maupun konflik yang terjadi di masyarakat. Berbagai tantangan tersebut berpotensi memunculkan perpecahan. Pertama, konflik yang terjadi di level masyarakat terkait Pilpres 2019 berpotensi memunculkan perpecahan skala nasional. Kedua, fragmentasi elit di dalam Muhammadiyah berpotensi memunculkan perpecahan dalam skala internal.

Beberapa studi telah menjelaskan topik yang relevan dengan artikel ini. Penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2014) dan Saputro (2018) menunjukkan bahwa Muhammadiyah dalam usianya yang sudah mencapai satu abad terus berupaya membangun bangsa Indonesia agar menjadi lebih baik. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya tersebut dilakukan melalui program peningkatan

pemberdayaan, pembinaan, pengembangan dan pendidikan politik masyarakat dan peningkatan keterlibatan dan partisipasi kebangsaan aktual dalam menghadapi permasalahan kontemporer kebangsaan. Muhammadiyah juga telah dan terus memainkan perannya dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan pembangunan “perdamaian positif” (*positive peace*) melalui berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan filantropi (Muhammad dkk 2019).

Penelitian lain yang mengambil topik tentang peran Muhammadiyah dalam Pilpres 2019 juga menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah berkontribusi dalam penanaman nilai dan norma bagi kader dan masyarakat dalam menentukan sikap pada kontestasi politik (Zainuddin 2021). Hal tersebut sangatlah penting mengingat Muhammadiyah pada dasarnya secara kelembagaan bersifat netral, tetapi membebaskan para kadernya untuk menentukan pilihan politiknya (Ridho 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Al-hamdi (2020) bahwa Muhammadiyah akan selalu menggunakan jalan tengah untuk terus dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara tanpa harus terjun langsung dalam ranah politik, misalnya mendirikan partai politik.

Selain itu, isu tentang kontribusi Muhammadiyah dan fragmentasi elitnya juga pernah diteliti oleh Efendi (2017) dalam penelitiannya “Fragmentasi Politik Muhammadiyah: Studi Tentang Elite Muhammadiyah dalam Pemilihan Presiden Tahun 2009”. Dia menunjukkan bahwa fragmentasi elit yang terjadi di Muhammadiyah bukan hal baru dan bersifat sangat beragam. Ada beberapa varian kelompok dalam fragmentasi elit ini, antara lain kelompok fundamentalis politik atau pragmatisme politik, kelompok moderat pasif, kelompok moderat aktif, kelompok khitois dan kelompok apolitis. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa fragmentasi elit di Muhammadiyah pada saat Pilpres 2009 terjadi karena kontinuitas sejarah, intervensi ideologi asing, desain organisasi yang inklusif dan otonom dan pragmatisme elit. Penelitian lain dilakukan oleh Sholikin (2018) yang menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan kolektif yang dianut oleh Muhammadiyah menyebabkan terjadinya deviasi netralitas politik elektoral Muhammadiyah pada level lokal dikarenakan adanya perbedaan pemikiran politik dari para elitnya.

Berbeda dari studi di atas, artikel ini lebih berfokus pada peran Muhammadiyah pada Pilpres 2019 dilihat dari tiga peran masyarakat sipil dalam negara demokrasi yang disampaikan oleh Budiman (2018), yaitu sebagai pelayan publik, substitusi dan penyeimbang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah lebih berfokus pada kelompok elit yang mendukung masing-masing calon dan kelompok

yang diam dengan pilihannya. Hal ini akan mudah untuk dipahami dan dapat membuktikan bahwa Muhammadiyah terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki pilihan politik yang berbeda-beda.

Artikel ini menggunakan perspektif deskriptif didukung dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mampu menjawab pertanyaan penelitian, yaitu Trisno Raharjo, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah; Bachtiar Dwi Kurniawan, Sekretaris Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah; Najih Prastyo, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM; dan Azaki Khoirudin, Anggota Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah. Selain wawancara, data dalam penelitian juga didapatkan melalui metode dokumentasi yang bersumber dari buku, jurnal, kuliah umum, regulasi, majalah, dan berita. Secara khusus, data-data terkait pernyataan dari Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, didapatkan dari surat kabar resmi milik Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah*. Untuk memperkuat bukti terkait sikap Muhammadiyah dalam Pilpres 2019, penelitian ini juga merujuk pada Instruksi PP Muhammadiyah. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman 1984).

Peran Politik Kebangsaan Muhammadiyah dalam Pilpres 2019

Gagasan tentang masyarakat sipil (*civil society*) sangat bervariasi sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, sudut pandang teoritis dan persuasi politik (Djuyandi, Firdaus, dan Hidayat 2018). Kaitannya dengan hal ini, Muhammadiyah sebagai kekuatan masyarakat sipil memilih untuk menjadi kelompok kepentingan sekaligus kelompok penekan. Artinya, Muhammadiyah lebih memilih untuk melakukan cara persuasif yang bersifat propaganda untuk memengaruhi pemerintah. Selain itu, cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menjadi sarana aspirasi rakyat dibandingkan partai politik. Meskipun bukan organisasi politik, Muhammadiyah tidak dapat menghindar dari urusan politik. Namun, perlu ditegaskan kembali bahwa Muhammadiyah bukan menjalankan politik praktis, melainkan politik kebangsaan yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara (Kurniawan 2020).

Peran Muhammadiyah sebagai masyarakat sipil pada penyelenggaraan Pilpres 2019 dapat dilihat dari tiga lingkup peran, yaitu pelayanan publik, substitusi dan penyeimbang. Peran sebagai pelayan masyarakat dilakukan Muhammadiyah melalui beberapa kegiatan normatif seperti mengeluarkan pernyataan sikap menjelang Pilpres hingga pasca Pilpres yang bertujuan

untuk menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah dan masyarakat secara luas. Selain itu, Muhammadiyah juga mengeluarkan sekaligus menegaskan sikapnya pada Pilpres 2019 dengan mengeluarkan Instruksi PP Muhammadiyah tentang netralitas lembaga. Instruksi tersebut menjadi salah satu bentuk layanan PP Muhammadiyah kepada warganya berkaitan dengan kepastian informasi dalam tindakan.

Selain itu, Muhammadiyah juga berperan aktif dalam mencegah penyebaran berita bohong (*hoax*) yang banyak terjadi pada penyelenggaraan Pilpres 2019. Peran tersebut, misalnya, dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan seminar tentang “Etika yang Baik di Media Sosial dan Pelatihan Cara Menangkal *Hoax*” oleh Majelis Pustaka dan Informasi (MPI). Kemudian, untuk mempertegas program Muhammadiyah dalam pencegahan berita *hoax*, pada tanggal 25-26 November 2018, Muhammadiyah melalui MPI bekerja sama dengan *Google News Initiative* (GNI) menyelenggarakan “Pelatihan Cara Menangkal *Hoax* bagi Utusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah se-Indonesia” dan mengadakan “Forum Dialog dan Literasi Media Sosial” hasil kerja sama *Suara Muhammadiyah* dan Kemenkominfo yang digelar pada 19 Maret 2019 di Hotel Cavinton Yogyakarta (Riz 2018: 62).

Muhammadiyah melalui amal usahanya juga turut memberikan wahana pengetahuan dan informasi tentang Pilpres 2019 bagi masyarakat umum dengan menyelenggarakan diskusi seputar Pemilu Serentak 2019 dan Pilpres 2019. Salah satu contohnya adalah kegiatan diskusi yang mengangkat tema “Peran Generasi Milenial dalam Pemilu Serentak 2019” yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada tanggal 5 April 2019. Acara tersebut merupakan hasil kerja sama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UMY dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Diskusi tersebut bertujuan untuk mengajak para kaum milenial agar tidak menjadi pasif, asosial dan apolitis, serta mengajak para kaum milenial untuk bersama-sama mewujudkan Pilpres 2019 yang demokratis dengan cara ikut berpartisipasi sebagai pemilih dan masyarakat yang bijak dalam mengelola informasi yang bertebaran secara masif (Riz 2018).

Peran kedua yang dimainkan oleh Muhammadiyah sebagai masyarakat sipil adalah peran substitusi. Peran tersebut dimaksudkan untuk melakukan kegiatan yang belum mampu dilaksanakan oleh negara atau melakukan kegiatan yang sebenarnya mampu dilaksanakan oleh negara, tetapi negara belum mampu melaksanakan secara menyeluruh. Peran substitusi ini telah dilaksanakan oleh Muhammadiyah pada perhelatan Pilpres 2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan pelibatan sejumlah pemantau pemilu seperti

Jaringan Pemantau Pemilu Muhammadiyah (JPPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan 'Aisyiyah yang tergabung dalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) (terakreditasi oleh Bawaslu RI) (Prastyo 2020).

Peran substitusi Muhammadiyah dalam Pilpres 2019 juga ditunjukkan melalui program yang dilaksanakan oleh salah satu amal usahanya, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Pada perhelatan Pilpres 2019 yang dibalut dalam Pemilu Serentak 2019, UMY menerjunkan mahasiswanya untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pengawasan Pemilu 2019. Sebanyak 186 mahasiswa disebar ke 22 desa di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Program KKN yang dilaksanakan pada 25 Maret-24 April 2019 ini merupakan tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilakukan oleh UMY dengan Bawaslu RI pada 20 Januari 2019 di Balai Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY dalam acara “Deklarasi Desa Anti Politik Uang (APU)” (BHP UMY 2019).

Peran substitusi lainnya juga dilakukan Muhammadiyah ketika konflik Pilpres 2019 yang ditandai dengan unjuk rasa pasca penetapan Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang pilpres oleh KPU RI. Peristiwa tersebut mendorong Muhammadiyah untuk menerjunkan tim medis dari Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi jatuhnya korban akibat aksi unjuk rasa di Jakarta. Respons cepat yang dilakukan MDMC pada tanggal 22 Mei 2019 ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah memainkan perannya sebagai masyarakat sipil. Ia tidak hanya bergerak pada tatanan pelaksanaan pemilu secara teknis, melainkan juga bekerja pada semua elemen yang berdampak pada kondisi masyarakat atau negara. Bagi organisasi besar seperti Muhammadiyah, memang sudah seharusnya mengambil peran besar untuk masyarakat dan negara. Kontribusi yang dilakukan oleh MDMC ini murni merupakan kegiatan kemanusiaan (Azza 2019).

Peran selanjutnya yang dilakukan Muhammadiyah kaitannya dengan Pilpres 2019 adalah peran penyeimbang. Masyarakat sipil sebagai kekuatan penyeimbang dimaksudkan untuk dapat melakukan kegiatan advokasi, pendampingan atau praktik-praktik oposisi dengan tujuan untuk menyeimbangkan kekuatan hegemonik negara. Dengan kata lain, masyarakat sipil dapat mencegah dominasi pemerintah yang terlalu besar dalam mengontrol proses demokrasi sehingga menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut, aktivitas Muhammadiyah sebagai

kekuatan penyeimbang pada perhelatan Pilpres 2019 telah dilakukan melalui apa yang disebut dengan Jihad Konstitusi. Ia merupakan bagian dari perjuangan Muhammadiyah dalam bidang hukum yang bertujuan untuk mengoreksi peraturan yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi bangsa dan negara. Jihad Konstitusi secara singkat dapat disebut sebagai perjuangan *amar makruf* dan *nahi munkar*.

Jihad Konstitusi Muhammadiyah pada Pilpres 2019 bahkan diupayakan oleh Muhammadiyah jauh sebelum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dimulai. Pada tanggal 9 Juni 2017, PP Muhammadiyah memberikan tujuh poin masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum. Masukan yang disampaikan pada saat itu diharapkan dapat diterima untuk menyempurnakan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Ribas 2017).

Pada Pilpres 2019 banyak terjadi kasus dalam ranah hukum dan HAM yang membuat peran penyeimbang Muhammadiyah juga semakin meningkat. Peran ini lebih banyak dijalankan oleh Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah. Adanya Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah (LBHM) di tingkat pusat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di seluruh daerah yang dibentuk pada tahun 2018 menjadi modal penting Muhammadiyah dalam memainkan perannya sebagai penyeimbang negara. Salah satu kegiatan advokasi atau pendampingan dilakukan oleh LBH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah pada kasus penyebaran *hoax* tujuh kontainer oleh Jarwoto, warga asal Brebes Jawa Tengah. Trisno Raharjo selaku Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah menjelaskan bahwa sebenarnya Jarwoto tidak dengan sengaja menyebarkan berita tersebut. Ia hanya sebagai penyebar (*forwarder*), bukan sebagai kreator (Raharjo 2020).

Kegiatan pendampingan hukum MHH juga dilakukan ketika terjadi kerusuhan pada 21-22 Mei 2019. Salah satu kasus yang ditangani adalah kasus Mustofa Nahrawardaya, pegiat media sosial yang ditangkap polisi karena diduga menyebarkan *hoax* dan melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). MHH menyakini bahwa Mustofa bukanlah orang pertama yang menyebarkan video terkait kerusuhan 21-22 Mei. Menurut MHH, kasus tersebut hanya dibuat-buat oleh pihak kepolisian karena Mustofa dianggap sebagai tokoh yang vokal serta dianggap telah menyudutkan pihak kepolisian sehingga dirinya ditangkap. Padahal banyak juga tokoh pendukung pemerintah yang juga melakukan hal yang sama, tetapi tidak diproses (Raharjo 2020).

Ketiga peran yang dimainkan oleh Muhammadiyah sebagai masyarakat sipil dalam negara demokrasi sebagai pelayan masyarakat,

substitusi, dan penyeimbang telah dilaksanakan oleh Muhammadiyah dalam perhelatan Pilpres 2019 yang dibalut dalam Pemilu Serentak 2019. Peran-peran tersebut telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Pengambilan sikap Muhammadiyah rupanya bukan hanya dalam hal dukung-mendukung calon presiden dan wakil presiden, melainkan netralitasnya terlihat dalam segala aktivitasnya. Ketika negara membutuhkan bantuan dari Muhammadiyah, maka ia akan hadir. Ketika masyarakat membutuhkan Muhammadiyah, maka ia juga akan hadir.

Fragmentasi Elit Muhammadiyah dalam Pilpres 2019

Elit merupakan sekelompok orang yang dalam keadaan sosial tertentu menempati jabatan tertinggi dan dianggap memiliki kekuasaan besar dan hak istimewa. Menurut Efendi (2017), elit juga dapat diartikan sebagai seseorang atau kelompok yang memiliki keunggulan untuk menjalankan peran yang memiliki pengaruh pada level kehidupan tertentu. Sementara itu, konsep elit dalam kaitannya dengan Muhammadiyah adalah orang-orang yang memiliki kekuatan kharisma, latar belakang pendidikan dan capaian pendidikan yang tinggi. Para elit ini menempati posisi penting seperti ketua umum beserta jajarannya, penasihat organisasi, ketua majelis, pemimpin universitas, lembaga-lembaga yang dimiliki oleh Muhammadiyah, serta tokoh-tokoh penting yang ada di dalamnya.

Konflik di dalam sebuah organisasi bukanlah hal yang dapat dihindari. Menurut Dalimunthe (2016:1-14), konflik merupakan pertentangan dalam pandangan atau tujuan antara dua orang atau lebih dari sebuah proses interaksi sosial. Konflik juga dapat dimengerti sebagai ketidaksamaan nilai atau visi antara anggota organisasi, perbedaan kepentingan, perbedaan perilaku kerja, perbedaan sifat dan perbedaan tanggungjawab dalam organisasi.

Dalam ilmu sosial dan politik, konsep fragmentasi dapat diartikan sebagai ketidaksatuan, keberagaman dan perpecahan dalam wujud nyata, alam pikiran, ideologi atau afiliasi politik. Efendi (2017) mengatakan bahwa fragmentasi juga dapat diartikan sebagai kondisi ketidaksatuan atau hilangnya koherensi satu dengan yang lain. Lebih lanjut, fragmentasi diartikan sebagai disintegrasi dari norma-norma sosial yang mengatur perilaku dan hubungan sosial. Kata fragmentasi sering digunakan dalam istilah-istilah politik seperti fragmentasi partai politik, fragmentasi hukum atau fragmentasi gerakan yang menggambarkan tidak adanya kesatuan, integrasi, homogenitas, keseragaman dan keutuhan.

Pada Pilpres 2019 yang diadakan serentak dengan Pileg 2019, Muhammadiyah menyatakan netral secara kelembagaan dan tidak akan

berpolitik praktis. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Muhammadiyah jauh sebelum dikeluarkannya instruksi resmi bahwa Muhammadiyah secara kelembagaan bersikap netral. Akan tetapi, rupanya pernyataan tersebut mendapatkan komentar atau kritikan dari salah satu elitnya, yaitu Amien Rais. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 1995-1998 ini mengeluarkan pernyataan kontroversial. Amien mengancam akan “menjewer” Haedar Nashir apabila Muhammadiyah membebaskan kadernya untuk menentukan pilihan pada Pilpres 2019 (Isnanto 2018).

Pernyataan tersebut dilontarkan Amien pada saat acara “Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke 106 Muhammadiyah” di Islamic Center Surabaya pada tanggal 21 November 2018. Sontak saja pernyataan tersebut mendapatkan respons beragam dari beberapa elit Muhammadiyah. Banyak yang menentang, tapi ada juga yang menganggapnya wajar. Munculnya pernyataan Amien Rais tersebut memperlihatkan kepada publik bahwa Muhammadiyah sedang dihadang tantangan dari kader internalnya sendiri. Hal tersebut menjadi awal dari permainan politik yang ingin menyeret Muhammadiyah ke dalam politik praktis dan awal kemunculan fragmentasi pandangan secara internal.

Fragmentasi yang terjadi di Muhammadiyah juga ditunjukkan dengan adanya perbedaan pengambilan sikap dalam menentukan pilihannya pada Pilpres 2019. Beberapa tokoh elit dan kelompok eksponen Muhammadiyah secara jelas dan terlihat di hadapan publik mendukung pasangan calonnya masing-masing, baik Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi. Namun, ada juga beberapa tokoh elit yang menjaga pilihannya agar tidak tampak oleh publik. Karena itu, pada Pilpres 2019, Muhammadiyah telah terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pendukung Jokowi-Ma’ruf, pendukung Prabowo-Sandi dan kelompok yang diam dengan pilihannya.

Kelompok Pendukung Jokowi-Ma’ruf

Beberapa elit dan kelompok eksponen Muhammadiyah teridentifikasi mendukung Jokowi-Ma’ruf. Sebagian mendeklarasikan diri secara terbuka, menyampaikan secara tersirat, menyatakan adanya kedekatan hubungan dan menyampaikan langsung dukungannya kepada penulis ketika wawancara. Elit yang diketahui mendukung Jokowi-Ma’ruf adalah Buya Syafii Maarif (Febrianto 2019), Mahadjir Effendy (Jordan 2018), Hajriyanto Y. Thohari (FHR and CTR 2018), Malik Fadjar (Puspita 2019), Syafiq A. Mughni, Trisno Raharjo (Raharjo 2020), Raja Juli Antoni (Sutrisno 2018), Soetrisno Bachir (Puspita 2019), Imam Addaruqutni, Faozan Amar (Yud 2019), Muhammad Fahrial Aulia (Mam 2019) dan Khoirul Muttaqin (Adji 2018).

Selain para elit, dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf juga berasal dari kelompok eksponen Muhammadiyah seperti Eksponen Muda Muhammadiyah (gabungan dari Solo Raya dan perwakilan 18 provinsi) yang mengklaim 51% warga Muhammadiyah mendukung pasangan calon 01 (Jokowi-Ma'ruf) (Yud 2019), Aktivis Muda Muhammadiyah (Adji 2018), Perempuan Muhammadiyah, Jaringan Satu Matahari (Susthira 2019) dan Alumni Perguruan Muhammadiyah (Yud 2019).

Kelompok Pendukung Prabowo-Sandi

Beberapa elit dan kelompok eksponen Muhammadiyah juga telah teridentifikasi mendukung Prabowo-Sandi. Sama seperti pendukung Jokowi-Ma'ruf, sebagian mendeklarasikan secara terbuka, menyampaikan secara tersirat, menyatakan adanya kedekatan hubungan dan menyampaikan dukungannya secara langsung kepada penulis ketika wawancara.

Elit Muhammadiyah yang mendukung Prabowo-Sandi adalah Busyro Muqoddas (Komara 2019), Dahnil Anzar Simanjuntak (Nasution, Mukhtar, and Suryarandika 2018), Dahlan Rais (Sunaryo 2018), Suyatno (Bendahara Umum PP Muhammadiyah) (Putri 2018), Bachtiar Effendi (Antoni 2019), Amien Rais (Wicaksono 2018), Hanafi Rais (Hermawan 2018), Muhammad Izzul Muslimin (Sidik 2019) dan keluarga besar K.H. Ahmad Dahlan (Wicaksono 2019). Sementara itu, dukungan Prabowo-Sandi juga hadir dari eksponen Muhammadiyah, yaitu Aliansi Pencerah Indonesia (API) yang merupakan kumpulan eksponen Muhammadiyah dan 'Aisyiyah. API mengklaim bahwa 90% warga Muhammadiyah akan memilih pasangan calon 02 (Prabowo-Sandi) dan siap untuk menyumbang sebanyak 25, 7 juta suara (Sidik 2019).

Kelompok yang Diam dengan Pilihannya

Kelompok yang diam dan tidak menyatakan pilihannya ke publik, baik secara terbuka maupun tersirat, ditunjukkan dengan ketiadaan informasi atau bukti bahwa tokoh tersebut memihak. Mereka adalah tokoh yang menjaga kestabilan suhu politik yang ada di internal Muhammadiyah. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam kelompok ini adalah Haedar Nashir, Siti Noordjannah Djohantini, Sunanto (Ketum PP Pemuda Muhammadiyah), Najih Prastiyo, Hafizh Syafa'aturrahman (Ketum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah), Abdul Mu'ti, Yunahar Ilyas, Anwar Abbas dan Dadang Kahmad.

Jika dilihat dari pilihan politik para kadernya, Muhammadiyah memang berwarna. Para kader tersebut telah bergabung ke berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Raja Juli Antoni, misalnya, bergabung dengan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dahnil Anzar dengan Partai Gerindra dan banyak juga kader Muhammadiyah yang menjadi kader Partai Golkar dan PAN. Pilihan dukungannya pun berbeda-beda, sebagian mendukung Jokowi-Ma'rif dan sebagian lainnya mendukung Prabowo-Sandi. Oleh karena itu, apabila Muhammadiyah berpihak kepada salah satu pasangan calon, maka akan membuat kader-kadernya kebingungan dan merasa tidak dihormati atas pilihan politiknya (Khoirudin 2020). Terkait adanya kelompok-kelompok eksponen yang mendukung masing-masing kandidat, Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan afiliasi pribadi dan bukan mewakili organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah memang tidak melarang warganya untuk ikut dalam politik maupun tim sukses, tetapi Muhammadiyah selalu berpesan kepada warganya yang terjun ke dalam politik untuk bersikap dewasa, menjaga kerukunan, dan mematuhi ketentuan persyarikatan. Kemudian, terkait adanya klaim-klaim suara, Muhammadiyah memandang bahwa angka-angka tersebut berlebihan dan hanya merupakan permainan politik (Wahid 2019).

Perbedaan pilihan para elit maupun kelompok eksponen Muhammadiyah terkait capres-cawapres menunjukkan bahwa Muhammadiyah memang tidak melarang dan membebaskan kadernya untuk menentukan pilihannya dalam Pilpres 2019. Hanya saja, yang menjadi penegasan adalah bahwa pilihan yang disampaikan oleh para elit dan eksponen Muhammadiyah tersebut merupakan pilihan atas nama pribadi dan bukan atas nama organisasi Muhammadiyah.

Resolusi Konflik Muhammadiyah dalam Pilpres 2019

Pada perhelatan Pilpres 2019, Muhammadiyah telah menghadapi banyak konflik, baik internal maupun eksternal. Konflik-konflik tersebut dikelola Muhammadiyah dengan tujuan agar dampaknya tidak semakin memburuk dan mengurangi nilai demokrasi pada perhelatan Pilpres 2019. Upaya melakukan resolusi konflik tersebut telah dilaksanakan pada semua tahapannya, sebagaimana dijelaskan oleh Suhardono (2015:1-16), yaitu meliputi tahap persiapan intervensi, tahap meningkatkan kesadaran dan tindakan untuk mendukung perubahan, tahap pencegahan, tahap mempertahankan kehadiran dan tahap penyelesaian konflik.

Tahap Persiapan Intervensi

Pada tahap persiapan intervensi, Muhammadiyah mencoba untuk mengelola konflik beda pandangan yang terjadi di internal Muhammadiyah. Konflik internal tersebut muncul ke permukaan dan mulai menarik perhatian publik

ketika Amien Rais mengancam akan “menjewer” Haedar Nashir karena membebaskan warga Muhammadiyah untuk menentukan pilihannya. Konflik beda pandangan tersebut dikelola Muhammadiyah melalui tahap persiapan intervensi dengan pendekatan penolakan. Hal tersebut terlihat dengan adanya sangkalan dan sikap pengabaian dari PP Muhammadiyah terhadap pernyataan Amien Rais tersebut. Pimpinan PP Muhammadiyah seperti Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti merespons balik ucapan Amien Rais dengan menegaskan bahwa Muhammadiyah akan tetap dengan keputusan awal, yaitu bersikap netral dan membebaskan warga Muhammadiyah untuk menentukan pilihannya di Pilpres 2019.

Sementara itu, ketegangan antar pendukung yang terjadi di masyarakat membuat kestabilan sosial terganggu. Tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Untuk itu, pada tahapan ini, Muhammadiyah juga mencoba untuk melakukan resolusi konflik yang terjadi di eksternal Muhammadiyah dengan pendekatan pengendalian. Muhammadiyah selalu mengimbau masyarakat untuk mendukung pilihannya dengan tetap menjaga kedamaian dan persatuan. Imbauan tersebut sering dikeluarkan oleh Haedar Nashir atau tokoh-tokoh Muhammadiyah melalui pernyataan di media. Selain itu, diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh beberapa pimpinan wilayah atau daerah, organisasi otonom (ortom) dan amal usaha Muhammadiyah juga turut menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk mengurangi “tensi panas” yang terjadi di masyarakat telah dilakukan oleh Muhammadiyah (Prastyo 2020).

Tahap Meningkatkan Kesadaran dan Tindakan untuk Mendukung Perubahan

Tahap selanjutnya yang dilakukan Muhammadiyah adalah meningkatkan kesadaran dan tindakan untuk mendukung perubahan. Di internal Muhammadiyah, permasalahan beda pandang antar elit masih dikhawatirkan memiliki pengaruh pada warganya. Untuk itu, melalui kanal *Suara Muhammadiyah*, Haedar Nashir menulis artikel berjudul “Istiqamah di Atas Khittah” yang mengingatkan kembali kepada seluruh warga Muhammadiyah tentang khittah Muhammadiyah yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tulisan tersebut juga menegaskan kembali kepada seluruh warga Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah akan tetap istiqamah dengan khittahnya dan tidak akan berpolitik praktis (Nashir 2018).

Muhammadiyah sadar betul dengan adanya konflik yang ada di internal organisasinya. Karena itu, melalui Instruksi PP Muhammadiyah tentang “Menjaga Netralitas Persyarikatan dan Amal Usaha” (2019),

Muhammadiyah menginstruksikan kepada seluruh warga untuk memedomani kepribadian, khittah dan kebijakan PP Muhammadiyah dalam menghadapi tahun politik 2019 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota Legislatif .

Terkait himbauan kepada masyarakat umum menjelang hari pencoblosan, Muhammadiyah menggelar konferensi pers pada tanggal 15 April 2019 di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Dalam konferensi pers tersebut, PP Muhammadiyah mengimbau seluruh warga yang memiliki hak pilih untuk menggunakannya dengan bijak pada hari pencoblosan. Kemudian, karena pada saat itu merupakan hari tenang, PP Muhammadiyah meminta para pendukung masing-masing calon untuk menjaga kedamaian. Selain itu, PP Muhammadiyah juga berpesan apabila terjadi permasalahan pemilu hendaknya diselesaikan melalui jalur konstitusional dan menghindari usaha untuk memobilisasi massa, provokasi atau aksi-aksi yang dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat (Rahayu 2019).

Tahap Pencegahan

Tahapan pencegahan dilakukan Muhammadiyah melalui pernyataan pers pasca hari pencoblosan 17 April 2019. Melalui pernyataan tersebut, Muhammadiyah mengimbau kepada warganya untuk menjadi teladan dalam menyikapi hasil-hasil pemilu. Muhammadiyah juga mempertemukan seluruh Ketua PP Muhammadiyah dan seluruh PWM se-Indonesia dalam agenda Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang berlangsung pada 8 Mei 2019 di UMY. Pada acara tersebut, Muhammadiyah membahas tentang dinamika persyarikatan, termasuk dinamika politik. Haedar Nashir meminta kepada seluruh pimpinan yang ada di Muhammadiyah untuk menerima apapun hasil dari Pilpres 2019. Selain itu, sekretaris umum Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, juga mengajak segenap warga Muhammadiyah untuk patuh terhadap instruksi PP Muhammadiyah dalam menyikapi pemilu (Ridha 2019: 58-59).

Terkait situasi yang ada di masyarakat, Muhammadiyah berupaya untuk mencegah timbulnya konflik yang memanas dengan mengadakan pertemuan para tokoh nasional. PP Muhammadiyah yang diwakili langsung oleh Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti bertemu dengan Jusuf Kalla dan para tokoh organisasi Islam untuk merespons suasa Pemilu Serentak 2019. Pada pertemuan tersebut, Haedar menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk kembali beraktivitas rutin guna menghindari kemungkinan terburuk. Haedar juga meminta para elit bangsa, terutama pasangan capres-cawapres, partai pendukung dan para politisi untuk

menyudahi pertentangan. Selain itu, di dalam pertemuan tersebut juga disepakati agar Jokowi dan Prabowo segera bertemu (Ribas 2019: 55).

Tahap Mempertahankan Kehadiran

Dalam tahap mempertahankan kehadiran, Muhammadiyah lebih banyak menyebarkan pesan-pesan atau himbauan melalui kanal *Suara Muhammadiyah* sebagai bagian dari resolusi konflik internal. Haedar Nashir hampir tidak pernah berhenti mengimbau warga Muhammadiyah untuk arif dalam menyikapi Pilpres 2019, tidak saling bermusuhan dan kembali merajut persatuan di dalam persyarikatan.

Menjelang hari pengumuman hasil pilpres, KPU masih gencar diserang oleh berbagai upaya delegitimasi. Upaya tersebut dilakukan sebagai cara untuk mendelegitimasi hasil Pemilu 2019. Hal ini dinilai sebagai sikap yang bertentangan dengan prinsip demokrasi karena tidak mempercayai KPU sebagai lembaga yang kredibel (Sastranegara 2019). Sejalan dengan hal tersebut, IMM dengan tegas mengambil sikap bahwa KPU “jangan diganggu” hanya karena mencari objek untuk mendegradasi kualitas dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. IMM saat menggelar aksi bela KPU di depan Gedung KPU menegaskan bahwa IMM menolak berbagai upaya yang ditujukan untuk mendelegitimasi KPU. IMM berupaya mengawal kestabilan situasi di masyarakat agar tercipta situasi yang kondusif (Prastyo 2020).

Ketika konflik Pilpres kembali memanas paska pengumuman hasil pilpres pada bulan Mei 2019, Muhammadiyah tetap mempertahankan kehadirannya dengan menerjunkan bantuan dalam bidang kesehatan melalui MDMC dan RS PKU yang dimilikinya. Selain itu, Muhammadiyah juga terus memantau perkembangan situasi yang memanas tersebut. Salah satu upayanya adalah melalui Majelis Hukum dan HAM yang aktif dalam mengawasi dan mendampingi para kader Muhammadiyah yang tidak sengaja terlibat dalam kerusuhan agar mendapatkan keadilan sesuai dengan konstitusi yang berlaku (Raharjo 2020).

Muhammadiyah melakukan upaya untuk menciptakan situasi kondusif setelah terjadi kerusuhan Mei 2019 dengan menggelar konferensi pers. Muhammadiyah mengemukakan adanya kerusuhan Mei yang disebabkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Melalui konferensi pers tersebut, Muhammadiyah meminta aparat untuk menjalankan tugasnya dengan baik, santun dan profesional. Selain itu, Muhammadiyah juga meminta para aksi demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi politiknya dengan damai dan menjauhi segala bentuk kekerasan (Farisa 2019).

Tahap Penyelesaian Konflik

Upaya untuk menyelesaikan konflik di internal Muhammadiyah dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pesan atau pernyataan PP Muhammadiyah yang dimuat dalam *Suara Muhammadiyah*. Salah satu tulisan Haedar Nashir berjudul “Amar Makruf Nahi Munkar dan Pertarungan Politik” mengingatkan kepada para warga Muhammadiyah bahwa politik merupakan hal yang fleksibel (Nashir 2019a). Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penarikan diri beberapa partai politik dari persengkataan pemilu. Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya pertemuan antara Jokowi dan Prabowo yang sekaligus menunjukkan kepada warga Muhammadiyah dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa konflik Pilpres 2019 telah berakhir.

Selain tahapan-tahapan dalam resolusi konflik yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah, rekonstruksi konflik juga menjadi tahapan yang telah diupayakan Muhammadiyah dengan tujuan menciptakan kondisi yang kondusif setelah terjadi konflik pada Pilpres 2019. Rekonstruksi konflik dilakukan oleh Muhammadiyah dengan memberikan imbauan normatif melalui kanal *Suara Muhammadiyah*. Tulisan Haedar Nashir yang berjudul “Merajut Keutuhan Persyarikatan” difokuskan untuk menghimbau seluruh warga agar dapat menerima hasil akhir Pilpres 2019 dengan lapang dada. Selain itu, imbauan juga ditujukan kepada seluruh kader Muhammadiyah agar merekatkan kembali hubungan baik yang sempat terganggu pada Pilpres 2019 (Nashir 2019).

Muhammadiyah juga menggelar acara “Diskusi Akhir Tahun 2019” pada tanggal 30 Desember 2019 di Aula Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta (Widiyanto 2019). Salah satu topik yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah masalah politik, khususnya Pemilu 2019. Diskusi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus memberikan masukan untuk Pemilu dan Pilpres selanjutnya.

Kesimpulan

Artikel ini telah menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi massa besar yang berkontribusi menjaga pilar demokrasi dan kedamaian bangsa telah menjalankan perannya dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan Pilpres 2019 yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Semua kejadian yang terjadi pada Pilpres 2019 telah memberikan banyak pengalaman bagi Muhammadiyah, terutama dalam mengelola konflik yang terjadi di internal organisasinya. Upaya resolusi konflik di masyarakat yang dilakukan Muhammadiyah pada Pilpres

2019 menunjukkan eksistensi Muhammadiyah sebagai organisasi yang tidak apatis terhadap keadaan dan masa depan bangsa. Meskipun tidak berpolitik praktis, tetapi prinsip politik tingkat tinggi (*high politics*) yang dimainkannya telah turut berkontribusi dalam menyukseskan perhelatan akbar Pilpres 2019. Peran yang dilakukan oleh Muhammadiyah sejatinya menunjukkan bahwa masyarakat sipil di suatu negara demokrasi menjadi kekuatan netral yang tidak menjadi mesin politik bagi kekuatan politik tertentu. Apabila ada kekuatan masyarakat sipil yang memutuskan untuk menjadi basis pendukung atau tim pemenang suatu kekuatan politik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat sipil tidak jauh berbeda dengan partai politik. Muhammadiyah memiliki sikap netral secara instansi. Tokoh-tokoh Muhammadiyah juga berada pada masing-masing kubu pasangan calon. Selain itu, banyak peran yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam mewujudkan Pilpres 2019 yang demokratis. Hal ini tentu saja menghadirkan dampak baik bagi Muhammadiyah. Dampak baik yang dimaksud adalah tetap kokohnya citra Muhammadiyah sebagai kekuatan besar yang selalu memperjuangkan kepentingan umum.

Selain itu, karena Muhammadiyah pada Pilpres 2019 tidak memihak ke salah satu pasangan calon, kader-kader atau tokoh-tokoh terbaik Muhammadiyah memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi rekan kerja presiden terpilih. Hal tersebut terbukti dengan adanya pengangkatan Muhadjir Effendy (Ketua PP Muhammadiyah) sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia periode 2019-2024, Rahmawati Husein (Wakil Ketua MDMC) sebagai salah satu penasihat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan beberapa tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya yang diangkat untuk jabatan lainnya. Meskipun jabatan-jabatan tersebut bukan tujuan, hal tersebut merupakan hasil sekaligus apresiasi pemerintah atas peran besar yang dilakukan oleh Muhammadiyah bagi bangsa ini, khususnya pada penyelenggaraan Pilpres 2019.

Referensi

- Adji, Bayu. 2018. "Aktivis Muda Muhammadiyah Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf." *Republika.co.id*. Diakses pada 11 Februari 2020 dari (<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pgbybn440/aktivis-muda-muhammadiyah-deklarasi-dukung-jokowimaruf>).
- Al-hamdi, Ridho. 2020. *Paradigma Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: IRCiSoD.

- Anon. 2019. "Instruksi PP Muhammadiyah Tentang Menjaga Netralitas Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah."
- Antoni, Raja Juli. 2019. "Saya dan Bahtiar Effendy." *Geotimes*. Diakses pada 14 Februari 2020 dari (<https://geotimes.co.id/kolom/saya-dan-bahtiar-effendy/>).
- Azza. 2019. "MDMC Terjunkan Tim Kesehatan Antisipasi Kerusuhan." *Suara Muhammadiyah*. Diakses pada 11 Februari 2020 dari (<http://www.suaramuhammadiyah.id/2019/05/23/mdmc-terjunkan-tim-kesehatan-antisipasi-kerusuhan/>).
- BHP UMY. 2019. "Dukung Pelaksanaan Pemilu, UMY Terjunkan Mahasiswa KKN Sebagai Relawan." Diakses pada 20 Februari 2020 dari (<http://www.umat.ac.id/dukung-pelaksanaan-pemilu-umat-terjunkan-mahasiswa-kkn-sebagai-relawan.html>).
- Budiman, Arief. 2018. "Kontribusi Civil Society dalam Tahun Politik 2018-2019." *Departemen Politik Dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada*. Diakses pada 9 Oktober 2019 dari (<http://fisipol.ugm.ac.id/kpu-ingin-civil-society-terlibat-aktif-di-tahun-politik/>).
- Dalimunthe, Syairal F. 2016. "Manajemen Konflik dalam Organisasi." *Jurnal Bahas Unimed* 27(1):1-14.
- Djuyandi, Yusa, Mohamad Firdaus, and Arief Hidayat. 2018. "Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengisian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi pada Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah." *Jurnal Wacana Politik* 3(2):108-20.
- Efendi, David. 2017. "Fragmentasi Politik Muhammadiyah: Studi Tentang Elite Muhammadiyah dalam Pemilihan Presiden Tahun 2009." Diakses pada 14 Januari 2020 dari (https://www.researchgate.net/publication/317025909_FRAGMENTASI_POLITIK_MUHAMMADIYAH_Studi_Tentang_Elite_Muhammadiyah_dalam_Pemilihan_Presiden_Tahun_2009).
- Farisa, Fitria Chusna. 2019. "Kecam Keras Kerusuhan, PP Muhammadiyah Minta Aksi Massa Dihentikan." *Kompas.com*. Diakses pada 30 Januari 2020 dari (<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/23/11092031/kecam-keras-kerusuhan-pp-muhammadiyah-minta-aksi-massa-dihentikan>).
- Febrianto, Nanda. 2019. "Buya Syafii Maarif, Tokoh Muhammadiyah yang Setia Dukung Jokowi." *Tagar.id*. Diakses pada 11 Februari 2020 dari (<https://www.tagar.id/buya-syafii-maarif-tokoh-muhammadiyah-yang-setia-dukung-jokowi>).

- FHR, and CTR. 2018. "Daftar Lengkap Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin." *CNN Indonesia*. Diakses pada 7 Februari 2020 dari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180820181854-32-323717/daftar-lengkap-tim-pemenangan-jokowi-maruf-amin>).
- Hermawan, Bayu. 2018. "Hanafi: PAN Terbuka Dukung Sandiaga Jadi Cawapres Prabowo." *Republika.Co.Id*. Diakses pada 12 Februari 2020 dari (<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/08/09/pd6xss354-hanafi-pan-terbuka-dukung-sandiaga-jadi-cawapres-prabowo>).
- Isnanto, Bayu Ardi. 2018. "Amien Rais Ancam Jewer Haedar, Dahlan Rais Membela." *Newsdetik*. Diakses pada 7 Februari 2020 dari (<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4313328/amien-rais-ancam-jewer-haedar-dahlan-rais-membela>).
- Jordan, Ray. 2018. "Banyak Menteri Antar Jokowi Daftar Capres, Istana: Sebagai Individu." *Newsdetik*. Diakses pada 9 Februari 2020 dari (<https://news.detik.com/berita/d-4159943/banyak-menteri-antar-jokowi-daftar-capres-istana-sebagai-individu>).
- Khoirudin, Azaki. 2020. Wawancara pribadi.
- Komara, Indra. 2019. "Eks Pimpinan KPK yang Bantu Debat Prabowo-Sandi: BW dan Busyro Muqoddas." *Newsdetik*. Diakses pada 11 Februari 2020 dari (<https://news.detik.com/berita/d-4380670/eks-pimpinan-kpk-yang-bantu-debat-prabowo-sandi-bw-dan-busyro-muqoddas>).
- Kurniawan, Bachtiar Dwi. 2020. Wawancara pribadi.
- Mam. 2019. "Sah! Eksponen Muda Muhammadiyah Dukung Jokowi – Ma'ruf." *Krjogja.com*. Diakses pada 5 Februari 2020 dari (<https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/solo/sah-eksponen-muda-muhammadiyah-dukung-jokowi-maruf/>).
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. London: Sage Publications.
- Muhammad Najib Azca, Hairus Salim, Moh Zaki Arrobi, Budi Asyahari, Ali Usman. 2019. *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nashir, Haedar. 2011. *Muhammadiyah Abad Kedua*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, Haedar. 2018. "Istiqamah di Atas Khittah." *Suara Muhammadiyah*, 5.

- Nashir, Haedar. 2019a. "Amar Makruf Nahi Munkar dan Pertarungan Politik." *Suara Muhammadiyah*, 5.
- Nashir, Haedar. 2019b. "Merajut Keutuhan Persyarikatan." *Suara Muhammadiyah*, 5.
- Nasution, Deddy Darmawan, Umar Mukhtar, and Rizky Suryarandika. 2018. "Alasan Dahnil Gabung ke Prabowo dan Kekhawatiran Kubu Jokowi." *Republika.co.id*. Diakses pada 12 Februari 2020 dari (<https://republika.co.id/berita/pfcykf409/alasan-dahnil-gabung-ke-prabowo-dan-kekhawatiran-kubu-jokowi>).
- Prastyo, Najih. 2020. Wawancara pribadi.
- Puspita, Ratna. 2019. "Soetrisno: Sebagian Besar Warga Muhammadiyah Dukung Jokowi." *Republika.Co.Id*. Diakses pada 10 Februari 2020 dari (<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/ppragp428/soetrisno-sebagian-besar-warga-muhammadiyah-dukung-jokowi>).
- Putri, Budiarti Utami. 2018. "Tokoh Muhammadiyah di Kubu Prabowo - Sandiaga." *Tempo.co*. Diakses pada 13 Februari 2020 dari (<https://nasional.tempo.co/read/1130123/tokoh-muhammadiyah-di-kubu-prabowo-sandiaga/full&view=ok>).
- Raharjo, Trisno. 2020. Wawancara pribadi.
- Rahayu, Lisyé Sri. 2019. "PP Muhammadiyah Ajak Warga Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2019." *Newsdetik*. Diakses pada 15 Februari 2020 dari (<https://news.detik.com/berita/d-4510944/pp-muhammadiyah-ajak-warga-gunakan-hak-pilih-di-pemilu-2019>).
- Ribas. 2017. "Tujuh Masukan PP Muhammadiyah Untuk RUU Pemilu." *Suara Muhammadiyah*. Diakses pada 1 Januari 2020 dari (<http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/06/10/tujuh-masukan-pp-muhammadiyah-untuk-ruu-pemilu/>).
- Ribas. 2019. "Wapres Jusuf Kalla, Haedar Nashir, dan Para Tokoh Bertemu." *Suara Muhammadiyah* 55.
- Ridha. 2019. "Konsolidasi Nasional Muhammadiyah." *Suara Muhammadiyah*, 58–59.
- Ridho, Ali. 2019. "Arah Politik Muhammadiyah dalam Pilpres 2019 (Analisis Framing Model Robert N. Entman Dalam Media Online *Republika.co.id*, *Kumparan.com*, dan *Tribunnews.com*)." *Kalijaga Journal of Communication* 1(1):1–13.

- Riz. 2018a. "Generasi Millennial Menatap Pemilu Serentak 2019." *Suara Muhammadiyah*. Diakses pada 13 Februari 2020 dari (<http://www.suaramuhammadiyah.id/2018/04/06/generasi-millennial-menatap-pemilu-serentak-2019/>).
- Riz. 2018b. "Pelatihan Cara Menangkal Hoax." *Suara Muhammadiyah*, Desember 62.
- Saputro, Agus. 2018. "Agama dan Negara : Politik Identitas Menuju Pilpres 2019." *Asketik* 2(2). doi: 10.30762/ask.v2i2.912.
- Sastranegara, Catur. 2019. "Upaya Delegitimasi KPU dan Cara Curang untuk Gagalkan Hasil Pemilu?" *Jawa Pos*. Diakses pada 2 Januari 2020 dari (<https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/05/08/136042/upaya-delegitimasi-kpu-dan-cara-curang-untuk-gagalkan-hasil-pemilu>).
- Sholikin, Ahmad. 2018. "Perbedaan Sikap Politik Elektoral Muhammadiyah Antara Pusat dan Daerah." *Jurnal Polinter* 3(2):1–22.
- Sidik, Farih Maulana. 2019. "Ekspone Muhammadiyah Dukung Prabowo, Siap Sumbang 25,7 Juta Suara." *Newsdetik*. Diakses pada 10 Februari 2020 dari (<https://news.detik.com/berita/d-4451847/ekspone-muhammadiyah-dukung-prabowo-siap-sumbang-257-juta-suara>).
- Suhardono, Wisnu. 2015. "Konflik dan Resolusi." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* 2(1):1–16.
- Sunaryo, Arie. 2018. "Hadiri Deklarasi Relawan di Solo, Prabowo Ngaku Ketakutan dengan Besarnya Dukungan." *Merdeka.com*. Diakses pada 8 Februari 2020 dari (<https://www.merdeka.com/politik/hadiri-deklarasi-relawan-di-solo-prabowo-ngaku-ketakutan-dengan-besarnya-dukungan.html>).
- Susthira, Melalusa. 2019. "Ekspone Perempuan Muhammadiyah Dukung Jokowi-Ma'ruf." *Media Indonesia*. Diakses pada 5 Februari 2020 dari (<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/229276/ekspone-perempuan-muhammadiyah-dukung-jokowi-maruf>).
- Sutrisno, Elvan. 2018. "Jokowi Pilih Ma'ruf Amin, PSI: Kami Dukung Penuh." *Newsdetik*. Diakses pada 9 Februari 2020 dari (<https://news.detik.com/berita/d-4158971/jokowi-pilih-maruf-amin-psi-kami-dukung-penuh>).
- Syahputra, Hikmawan. 2014. "Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya* (10 September):1–30.

- Wahid, Ahmad Bil. 2019. "Ekspennya Dukung Prabowo-Sandi, Muhammadiyah Tegaskan Netral." *Newsdetik*. Diakses pada 13 Februari 2020 dari (<https://news.detik.com/berita/d-4452449/ekspennya-dukung-prabowo-sandi-muhammadiyah-tegaskan-netral>).
- Wicaksono, Adhi. 2018. "Amien Rais Dukung Prabowo, Jokowi Disebut Mulai Turun Pamor." *CNN Indonesia*. Diakses pada 10 Februari 2020 dari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180413100527-20-290512/amien-rais-dukung-prabowo-jokowi-disebut-mulai-turun-pamor>).
- Wicaksono, Pribadi. 2019. "Alasan Keluarga Pendiri Muhammadiyah Dukung Prabowo." *Tempo.co*. Diakses pada 10 Februari 2020 dari (<https://nasional.tempo.co/read/1188519/alasan-keluarga-pendiri-muhammadiyah-dukung-prabowo>).
- Widiyanto, Dinar. 2019. "Indonesia 'Terpeleset' dari Demokrasi Pancasila ke Liberal-Kapitalis." *Krjogja.com*. Diakses pada 5 Februari 2020 dari (<https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/indonesia-terpeleset-dari-demokrasi-pancasila-ke-liberal-kapitalis/>).
- Yud. 2019a. "Ini Seruan Nasional dari Alumni Perguruan Muhammadiyah for Jokowi." *Beritasatu*. Diakses pada 10 Februari 2020 dari (<https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/politik/547051/ini-seruan-nasional-dari-alumni-perguruan-muhammadiyah-for-jokowi>).
- Yud. 2019b. "Ribuan Ekspenen Muda Muhammadiyah Deklarasi Dukung Jokowi." *Beritasatu*. Diakses pada 5 Februari 2020 dari (<https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/politik/545883/ribuan-ekspenen-muda-muhammadiyah-deklarasi-dukung-jokowi>).
- Zainuddin, Hardianty. 2021. "Kontribusi Organisasi Muhammadiyah dan NU pada Pilpres 2019." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6(8). doi: <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i8.3881>.